

BAB II

DINAMIKA POLITIK DALAM NEGERI DAN HALUAN POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara dengan menganut sistem pemerintahan monarki yang memiliki peran besar dalam panggung Internasional. Selain berperan sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di Dunia Arab, Kerajaan Arab Saudi juga turut berperan aktif dalam perpolitikan Internasional, baik di dalam kawasan Teluk, Kawasan Timur Tengah, maupun ditataran Internasional secara lebih luas. Bab ini berusaha memaparkan serta menjelaskan tentang pergerakan atau dinamika politik dalam negeri Arab Saudi dan bagaimana haluan politik luar negerinya.

A. Kondisi Geografis dan Demografis Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya, berada di antara Laut Merah di sebelah barat (1.760 km) dan Teluk Arab di sebelah timur (560 km) serta merupakan negara terbesar di Jazirah Arab. Kerajaan ini menempati 80% dari Jazirah Arab. Arab Saudi merupakan negara terbesar kelima di Asia dan negara terbesar ke-dua di Dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi juga terletak diantara 15°LU – 32°LU dan antara 34°BT – 57°BT. Sebagian besar batas negara Arab Saudi berbatasan dengan Uni Emirat Arab (UAE), Kesultanan Oman, dan Republik Yaman. Arab Saudi berbatasan langsung dengan beberapa negara lainnya, yaitu Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Arab Saudi juga merupakan salah satu negara yang terletak dikawasan Teluk Persia, garis pantai yang luas di Teluk Persia dan Laut Merah memberikan pengaruh besar pada ekspor negara terutama minyak mentah melalui Teluk Persia dan Terusan Suez(kemenlu.go.id, 2017).

Gambar 2.1
Peta Arab Saudi



Sumber : Sejarah-negara.com

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa'ud. Luas negara Arab Saudi adalah 2.240.350 km² atau sama dengan 4/5 Semenanjung Arab. Dengan jumlah penduduk sebanyak 28.160.273 jiwa(kemenlu.go.id, 2017).

Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab dengan presentase 90%, Afro-Asia 9%, lain-lain 1%. Penduduk Arab Saudi mayoritas beragama Islam Sunni, adapun penganut syiah hanya sekitar 5% dan kebanyakan beada di daerah timur Arab Saudi. Di daerah daerah industri dijumpai

penduduk dari negara-negara lain sebagai kontraktor dan pekerja asing atau ekspatriat. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Arab Saudi adalah bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Secara umum bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab Saudi ada dua macam, yaitu bahasa Arab fushah (bahasa arab standar/baku) dan bahasa Arab amiyah (bahasa arab pasaran). Adapun bahasa inggis banyak digunakan di daerah perkotaan oleh para imigran(kemenlu.go.id, 2017).

B. Sistem Monarki Arab Saudi

Sistem adalah sebuah konsep ekologis yang memperlihatkan adanya organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi maupun yang dipengaruhi olehnya. Dengan demikian sistem dapat didefinisikan pula sebagai sebuah pengorganisasian masyarakat yang berupaya merumuskan serta berusaha mencapai tujuan bersama. Adapun sistem politik juga dapat didefinisikan sebagai sistem interaksi yang ditemukan didalam sebuah masyarakat merdeka yang sedang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakatnya sendiri maupun dalam menghadapi masyarakat yang berasal dari luar) dilakukan melalui penerapan atau berupa ancaman penerapan bersifat paksa yang kurang lebih dianggap sah (Mas'ood, 2006).

Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau *Kingdom of Saudi Arabia* yang dikenal dengan sistem monarki absolut di kawasan Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi berasal dari Dinasti Saud yang telah ada sejak abad ke- 18 di daerah Najd yang terletak di bagian tengah semenanjung Arab. Dinasti Saud didirikan oleh tokoh yang bernama Amir Muhammad bin Sa'ud (1703-1792). Kerajaan Arab Saudi dikuasai oleh keluarga Al-Saud yang berpijak pada ideologi mahzab Wahabi yang kemudian menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah Keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab.

Arab Saudi mengadopsi sistem monarki absolut dengan Raja sebagai Kepala Pemerintahan dan Negara. Sistem Monarki

(Kerajaan) berasal dari kata *Mono* yang artinya satu dan *Archein* yang artinya kekuasaan, sehingga Monarki dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Raja atau Kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga Raja berperan sebagai aktor pengambil keputusan tunggal. Kerajaan Arab Saudi adalah Negara yang murni menggunakan hukum Islam sebagai landasan utama untuk membuat peraturan-peraturan dalam negerinya. Dilihat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dirilis pada tahun 1993 yakni berisi 83 prinsip-prinsip atau ayat yang menegaskan kembali dasar kerajaan yang telah berjalan sejak masa awal berdirinya kerajaan tersebut. Diantaranya tertuang pada Pasal pertama yang menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan konstitusi Kerajaan Arab Saudi. Kemudian, pada Pasal 5, sistem politik digambarkan sebagai sebuah kerajaan. Undang-Undang Dasar juga menekankan betapa pentingnya nilai-nilai Islam untuk terus diterapkan. Pada Pasal 44 juga dipaparkan tiga kekuasaan negara, yaitu pengadilan atau lembaga hukum, eksekutif dan kekuasaan organisasional serta menyatakan bahwa Raja merupakan sumber utama pusat kekuasaan. Meskipun demikian, pada Pasal 46, pengadilan atau lembaga hukum dijelaskan sebagai kekuatan independen yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh surat keputusan dari Kerajaan. Hal yang sama juga berlaku pada wakil perdana menteri, menteri, deputy menteri dan pejabat senior. Tidak hanya itu, Undang-Undang Dasar juga menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh Raja (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2011).

Raja Arab Saudi menduduki hampir semua posisi strategis dan penting dalam tampuk pemerintahan, mendominasi keluarga besar Al-Saud, menguasai tahta politik serta ekonomi Arab Saudi. Penguasa Arab Saudi (Raja) memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk membatasi dan mempersempit berlakunya nilai-nilai liberal dan demokratis, serta membatasi keterlibatan rakyatnya untuk masuk ke dalam arena politik. Kekuasaan politik amat terpusat pada Raja yang memegang berbagai jabatan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinasti Saud;
- b. Perdana Menteri;
- c. Kepala Eksekutif;
- d. Imam Keagamaan Tertinggi;
- e. Komandan Angkatan Bersenjata;
- f. Kepala Pengadilan (Jatmika, 2001).

Dengan mengamati kekuasaan yang ada pada raja di Arab Saudi, maka dapat dikatakan bahwa kerajaan Arab Saudi menekankan kembali pandangan Islam, yang mana antara Agama dan Negara tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Rakyat Arab Saudi menunjukkan rasa solidaritas yang sangat besar dan mendukung penuh para pemimpin politik yaitu Raja yang membuat tuntutan serta melaksanakan kontrol penuh atas rakyat (Jatmika, 2001, hal. 158).

Dalam perkembangannya sistem politik dan struktur politik kerajaan Arab Saudi mengalami perubahan yang signifikan, yaitu di mana sebelumnya kerajaan ini menganut bentuk kekuasaan yang didalamnya dihiasi dan didominasi unsur keagamaan yang lebih bercorak pada tradisional primitif dan masih erat kaitannya dengan adat istiadat menjadi monarki absolut. Ditengah perubahan iklim sosial, ekonomi dan pendidikan yang sangat pesat ini, Arab Saudi tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi otoritas keagamaan dan politik tradisionalnya. Hubungan keluarga tetap menjadi faktor utama dalam pemerintahan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi masih menganut pola keterkaitan antara hubungan negara dan agama yang masih sangat kental untuk diterapkan. Namun di dalam perkembangan aktifitas politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Raja telah membentuk sebuah dewan untuk membantu tugasnya. Pemerintah dijalankan langsung oleh dewan keluarga yang bekerja secara konsesus. Jabatan di dalam dewan yang dibentuk Raja hanya dapat dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan dan kepala suku yang nantinya akan menduduki kursi jabatan sebagai menteri dan administratif (Lapidus, 1999).

Unsur nepotisme tak bisa dihindarkan dan masih sangat kental disetiap urusan pemerintahan Arab Saudi. Hampir sebagian besar yang menduduki kursi-kursi penting di dalam pemerintahan adalah keluarga kerajaan atau golongan yang memiliki pengaruh, misalnya para pengusaha ataupun bangsawan. Nilai-nilai demokratis sama sekali tidak ditunjukkan didalamnya. Namun satu hal yang sangat penting dalam sistem politik Arab Saudi yaitu komitmennya terhadap Islam. Masyarakat Saudi hampir tidak terpengaruh oleh nasionalisme dan sekulerisme dan penguasa Arab Saudi mengembangkan keabsahan domestik mereka dengan banyak memberikan perhatian kepada urusan agama dan memberlakukan moral Islam dengan sebaik-baiknya (Lapidus, 1999, hal. 187).

Sejak berdirinya kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 sampai sekarang, Arab Saudi telah dipimpin oleh tujuh orang Raja, yang mana dalam aturan pergantian Raja di Arab Saudi, Raja bisa dan akan digantikan apabila Raja pemegang tahta wafat. Jika dilihat dari sejarah kerajaan, baru satu kali terjadi penggulingan kekuasaan. Biasanya, Putra Mahkota yang telah dipersiapkan sebelumnya akan menggantikan Raja yang telah wafat. Namun, ada juga Raja yang menunjuk langsung wakil Putra Mahkota sebagai pengganti dirinya. Berikut struktur pemerintahan Arab Saudi diantaranya :

1. Raja (Kepala Pemerintahan)

Raja Arab Saudi saat ini adalah Raja Salman bin Abdul Azis Al-Saud. Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Arab Saudi, tapi kekuasaannya dibatasi oleh hukum Islam. Sistem kerajaan Arab Saudi bersifat turun temurun, jika Raja wafat maka akan digantikan oleh keturunannya. Raja Arab Saudi tidak membuat Undang-Undang, ia hanya mengeluarkan dekrit kerajaan yang harus sesuai dengan syariah. Tugas paling sulitnya adalah mempertahankan konsensus di antara keluarga kerajaan, para ulama dan suku-suku yang berpengaruh dalam masyarakat. Berikut adalah daftar Raja-Raja Kerajaan Arab Saudi dari masa ke masa :

a. Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud

Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, lahir di Riyadh pada tahun 1880 dan wafat pada 1953. Beliau memerintah Kerajaan Arab Saudi dimulai pada 22 September 1932 sampai dengan 9 November 1953. Raja yang akrab dikenal sebagai Ibn Saud ini membangun Kerajaannya berlandaskan Syariah Islam. Raja Ibn Saud berhasil mengubah Arab Saudi menjadi Negara Islam modern serta kaya akan tradisi dan budaya. Beliau juga dikenang baik sebagai negarawan besar yang pintar berpolitik serta tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

b. Raja Saud bin Abdul Aziz

Raja kedua Kerajaan Arab Saudi ini lahir pada tahun 1902 dan wafat pada tahun 1969. Saud ditahbiskan sebagai Putra Mahkota pada tahun 1933 dan mulai memimpin kerajaan pada tahun 1953 hingga 1964. Selama menduduki posisi sebagai Raja kedua, Raja Saud telah mendirikan berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Saud juga tak segan memberikan anak-anaknya jabatan tinggi dalam pemerintahannya. Kebiasaan ini membuat sang Raja digulingkan oleh keluarganya sendiri yaitu oleh sang adik, Faisal bin Abdul Aziz.

c. Raja Faisal bin Abdul Aziz

Raja Faisal lahir di Riyadh pada tahun 1906 dan wafat pada tahun 1975. Masa pemerintahannya dimulai pada tahun 1964 dan berakhir ketika ia wafat. Sebelum menggantikan Saud, Faisal sempat diangkat menjadi Menteri Luar Negeri oleh ayahnya, Abdul Aziz. Pemimpin inovator ini dikenal sebagai Raja yang Saleh dan sangat amat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja Faisal juga menjunjung tinggi program penghapusan perbudakan, bahkan beliau membeli seluruh budak di Arab dengan uang pribadinya hingga tak ada satu pun budak di negara itu.

d. Raja Khalid bin Abdul Aziz

Raja Khalid memerintah pada 1975 sampai tahun 1982, ia naik tahta ketika Raja Faisal wafat. Raja Khalid sebelumnya sempat menjabat sebagai Gubernur Hijaz pada 1932 dan ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1934. Beliau banyak membuat kebijakan dalam pemerintahannya baik itu kebijakan dalam ataupun luar negeri. Pada tahun 1982, Khalid berhasil memperbaharui persenjataan kerajaan dengan mendatangkan 16 pesawat tempur dari Amerika Serikat. Raja Khalid wafat pada 1982 akibat serangan jantung.

e. Raja Fahd bin Abdul Aziz

Raja kelima Arab Saudi ini sempat dilantik menjadi Menteri Pendidikan pada 1953. Kemudian dia menduduki kursi Menteri Dalam Negeri pada 1962. Raja Fahd naik tahta setelah Raja Khalid wafat pada Juni 1982. Raja kelima ini juga sangat berkontribusi dalam bidang diplomasi internasional Kerajaan Arab Saudi. Kerja kerasnya mampu mengangkat derajat perekonomian Arab Saudi. Pria yang lahir di Riyadh pada 1921 ini wafat pada 1995 karena serangan stroke.

f. Raja Abdullah bin Abdul Aziz

Raja keenam Arab Saudi ini lahir di Riyadh pada tahun 1924. Raja Abdullah naik menjadi Raja pada 2005 setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Raja Abdullah dikenal dengan pemimpin yang murah hati, dia juga memiliki banyak pengalaman dan memberikan pengaruh besar pada Kerajaan ketika masih menjadi Putera Mahkota di masa Raja Fahd. Sejak tahun 1995, Abdullah sudah mewakili peran Raja Fahd yang terserang stroke. Pada masa pemerintahannya Raja Abdullah banyak membuat kebijakan yang mampu menjadikan Arab Saudi disegani di panggung Internasional hingga saat ini. Raja Abdullah pun wafat pada jumat 23 Januari 2015.

g. Raja Salman bin Abdul Aziz

Raja Salman adalah Raja yang sampai saat ini memegang tampuk kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi. Raja yang lahir pada tahun 1935 ini sebelumnya berhasil mengubah wajah Riyadh, kota yang awalnya hanya memiliki 200 ribu penduduk kini menjelma menjadi kota bergaya kosmopolitan dengan lebih dari 7 juta penduduk dan menjadi rumah bagi puluhan perguruan yang berkualitas tinggi. Raja ketujuh Arab Saudi ini dikenal akrab sebagai sosok yang memiliki semangat besar dalam reformasi dan perubahan sosial untuk negaranya. Raja Salman pertama kali diangkat menjadi Gubernur ketika usianya baru menginjak 19 tahun. Raja Salman sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan banyak berkontribusi untuk negaranya di masa kepemimpinan Raja Abdullah (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2011).

Seiring dengan terjadinya beberapa perubahan sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial yang sangat cepat sehingga mengharuskan pemerintah Arab Saudi untuk mampu mengatur dinamika masyarakatnya. Konvensi lokal tradisional yang semula menjadi acuan berjalannya roda pemerintahan, dinilai sudah tidak ideal lagi untuk diterapkan di negara tersebut. Kepemilikan industri minyak dan bertambahnya wilayah-wilayah menjadi faktor utama terjadinya perubahan yang sangat signifikan. Jika kondisi seperti ini tidak segera dibendung, maka pemerintah akan mengalami banyak kesulitan, dirasa perlu adanya bantuan dari badan-badan administrasi yang fleksibel. Oleh karena itu, Raja membentuk dewan menteri guna bertanggung jawab atas anggaran dan urusan pemerintah lokal maupun regional (Jatmika, 2001, hal. 158).

Gambar 2.2

Silsilah Keluarga Kerajaan Arab Saudi



Sumber : grafis.tempo.co

2. Dewan Menteri

Hampir semua keputusan kebijakan utama memerlukan masukan dan pertimbangan dari pangeran dan para ulama senior di Arab. Ulama senior dan pemimpin bisnis memiliki pengaruh yang cukup besar, baik sebagai penasihat utama Raja maupun sebagai pengambil keputusan operasional. Pengambilan keputusan tidak dianggap hanya sebagai masalah politik biasa, melainkan dalam hal tradisi dan agama, hal ini merupakan salah satu sumber kekuatan politik yang kuat di Arab Saudi dan di dalam Keluarga Kerajaan itu sendiri. Kabinet Arab Saudi ini merupakan sesuatu yang cukup praktis dan mencerminkan komposisi distribusi kekuasaan dalam jajaran keluarga kerajaan Arab Saudi di kalangan senior dan para ulama. Kabinet adalah sebuah lembaga besar yang dipimpin oleh Raja, dengan lebih dari dua puluh anggota, termasuk di dalamnya enam menteri negara. Kabinet juga mencangkup dan didukung penuh oleh berbagai ulama.

3. Departemen dan Key Personal

Diantara dua puluh dua departemen yang terpisah, departemen-departemen penting dan strategis dikendalikan oleh anggota-anggota senior keluarga Kerajaan. Departemen tersebut

mencakup Wakil Perdana Menteri, Kepala Garda Nasional, Wakil II Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Penerbangan, Menteri Luar negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penunjukan ini memberikan legitimasi bagi anggota senior dari Keluarga Kerajaan untuk memegang kendali atas pemerintah, pertahanan, keamanan internal, anggaran pendapatan minyak serta melindungi area penting lainnya. Untuk melawan perkembangan resistensi kelembagaan di beberapa departemen, pada tahun 1992 Raja mengeluarkan keputusan yang mendeklarasikan bahwa seseorang tidak dapat menempati posisi menteri atau kabinet selama lebih dari lima tahun tanpa surat keputusan khusus dari Raja.

4. Majelis Al-Shura (Majelis Permusyawaratan)

Pada awalnya Majelis Al-Shura terdiri dari 61 anggota, termasuk didalamnya pembicara dari dewankonsulatif. Semua anggota yang telah ditunjuk oleh kerajaan untuk menjalankan masa kerja selama empat tahun lamanya. Dilihat secara teori tugasnya adalah untuk memeriksarencana pembangunan ekonomi dan sosial, menanyakan anggota kabinet dan memeriksa rencana tahunan yang diajukan oleh masing-masing kementerian lalu mengusulkan atau mengamandemen Undang-Undang baru. Namun, awalnya tugas dan fungsi Majelis AL-Shura ialah sebagai penasihat.

Pada tahun 1997 delapan komite *ad hoc* didirikan sebagai hasil dari kegiatan peningkatan dewan (saat ini ada dua belas dari mereka). Komite menjalankan tugasnya di sepanjang jalur demokratis dengan masing-masing anggota memiliki hak satu suara, seperti yang dilakukan dewan secara keseluruhan. Empat tahun kemudian, pada tahun 2001, jumlah anggota meningkat menjadi 150 dan peran komite diperluas, meliputi masalah-masalah keuangan, rencana lima tahunan, Islam, urusan sosial dan pendidikan. Para anggota dewan sekarang telah dinominasikan oleh gubernur provinsi, masing-masing nominasi diperiksa oleh lembaga pengadilan kerajaan. Sejak tahun 2002, Majelis juga memiliki hak untuk meminta setiap anggota kabinet atau Dewan Menteri untuk hadir dan menjawab segala pertanyaan. Meskipun tidak memainkan peran secara langsung dalam

permasalahan keamanan dan kebijakan pertahanan serta meninjau rancangan anggaran, tetapi mereka memiliki peran penting dalam meninjau rencana pembangunan.

C. Haluan Politik Luar negeri Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang berbatasan langsung dengan beberapa negara lain disekitarnya membuat hubungan diplomatik antar negara merupakan suatu fenomena yang wajar dan sangat perlu dibangun dalam hubungan internasional. Meskipun menganut sistem politik monarki absolut, Arab Saudi tidak menutup diri dari lingkungan internasional. Sejumlah kerjasama baik yang bersifat bilateral maupun multilateral terjalin antara Kerajaan Arab Saudi dengan sejumlah negara lain, baik didalam maupun diluar kawasan Timur Tengah. Yang mana Arab Saudi tercatat aktif dalam sejumlah organisasi internasional seperti PBB, G-20, OKI serta sejumlah organisasi internasional lainnya. Konstitusi Arab Saudi yang berlandaskan pada ajaran Islam juga tidak menjadi penghalang bagi Arab Saudi untuk menjalin kerjasama dengan negara – negara liberal seperti Amerika dan Inggris ataupun negara komunis seperti China sekalipun.

Politik luar negeri Arab Saudi dijalankan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan fakta geografi, sejarah, agama, ekonomi, keamanan dan politik. Prinsip ini digunakan untuk membentuk *framework* dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi seperti *good - neighbor policy*, kebijakan non intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, dan penguatan hubungan dengan negara teluk, negara arab serta negara islam. Kebijakan luar negeri Arab Saudi berjalan dengan beberapa sasaran lingkaran, yaitu; Lingkaran Negara Teluk, Lingkaran Negara Arab, Lingkaran Negara Islam, dan Lingkaran Internasional (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

Lingkaran pertama, dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi adalah negara-negara yang berada di Kawasan Teluk yaitu, Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Qatar dan Uni Emitrat Arab. Semenjak Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud mendirikan Kerajaan Arab

Saudi, daerah teluk merupakan lingkaran paling penting dan diperhatikan dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi. Hal ini dikarenakan pertimbangan beberapa faktor seperti; keterkaitan hubungan darah, sejarah hubungan kedua negara, lingkungan geografis yang unik, serta kesamaan sistem politik dan ekonomi. Adapun alasan kuat lain yang membuat Arab Saudi memprioritaskan hubungannya dengan negara-negara Teluk adalah karena letaknya yang berada dalam satu kawasan, hal ini akan mempengaruhi secara langsung terhadap stabilitas dalam negeri Arab Saudi (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

Kebijakan luar negeri Arab Saudi di lingkaran negara teluk berdasarkan prinsip-prinsip utamanya yaitu:

- 1) Keamanan dan stabilitas kawasan adalah tanggung jawab negara-negara di wilayah ini,
- 2) Negara - negara Teluk memiliki hak untuk mempertahankan keamanan mereka dan mempertahankan kemerdekaan mereka sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri dan sebagaimana dijamin oleh hukum internasional untuk menghadapi setiap tantangan internal maupun internasional,
- 3) Menolak campur tangan dalam urusan internal negara-negara ini, dan bekerja sama melawan setiap agresi pada salah satu anggota negara, sehubungan dengan agresi apapun, pada saat yang sama negara-negara anggota pertimbangkan agresi pada satu negara sebagai agresi pada semua anggota negara,
- 4) Memperkuat kerjasama antara Inggris dan negaranegara anggota *Gulf Cooperation Council* di berbagai politik, ekonomi, keamanan, sosial, bidang budaya dan lain-lain, melalui pendalaman hubungan antara negara-negara anggota,

- 5) Mengambil tindakan serius dan gigih untuk menyelesaikan semua sengketa (terutama sengketa perbatasan) antara negara-negara kawasan *neighbourhood policy*(Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

Lingkaran kedua dari kebijakan luar negeri Arab Saudi adalah Lingkaran Negara – negara Arab. Arab Saudi menyadari pentingnya mengembangkan dan mengkoordinasikan hubungan antara negara arab untuk menjaga kepentingan negara arab secara keseluruhan. Salah satu bentuk dari kebijakan ini adalah pendirian Liga Arab pada tahun 1945. Kebijakan Arab Saudi dalam lingkaran arab didasarkan pada prinsip persaudaraan dan solidaritas yang menawarkan semua jenis dukungan dan bantuan(Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

Lingkaran ketiga kebijakan luar negeri Arab Saudi adalah Lingkaran Dunia Islam. Islam selalu menjadi faktor penting dalam penentuan prioritas kebijakan luar negeri Arab Saudi. Kebijakan luar negeri Arab Saudi kepada negara-negara islam ditujukan untuk menyatukan negara islam sehingga terbentuknya ikatan solidaritas yang kuat anatar negara-negara islam di dunia. Kebijakn ini tercermin dalam pembentukan Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1969 yang kemudian berubah menjadi Organisasi Kerjasam Islam(Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

Lingkaran lebihkan luar negeri Arab Saudi yang terakhir adalah Lingkaran Internasional. Dalam Lingkaran Internasional, Arab Saudi sangat tertarik untuk membangun hubungan yang setara dengan negara-negara kuat dikarenakan kepentingan-kepentingan yang dimiliki Arab Saudi. Kepentingan ini muncul akibat peran penting arab sudi dalam Dunia Arab dan Islam. Dimana Arab Saudi berusaha untuk melebarkan kebijakannya mencapai level masyarakat internasional. Kebijakan ini tercermin dengan ikut sertanya Arab Saudi sebagai negara anggota pendiri Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945, yang mana Arab Saudi percaya bahwa

keamanan internasional merupakan bagian dari kebijakan luar negerinya (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

Berdasarkan haluan politik luar negeri Arab Saudi yang terbagi dalam empat lingkaran sasaran tersebut, dapat dikatakan bahwa Kanada merupakan negara yang termasuk didalam lingkaran terakhir politik luar negeri Arab Saudi dalam menjalin suatu hubungan bilateral. Arab Saudi sangat jelas tertarik untuk membangun hubungan yang hampir setara dengan negara-negara kuat termasuk Kanada dikarenakan kepentingan-kepentingan yang dimiliki Arab Saudi. Kepentingan ini muncul akibat peran penting Arab Saudi dalam Dunia Arab dan Islam. Dimana Arab Saudi berusaha untuk melebarkan kebijakannya mencapai level masyarakat internasional.